BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana . S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung.

Pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain : Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan /dihentikan , demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembangan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi (yang meliputi 3 Kecamatan) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara. Hal tersebut membuat rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk menyalurkan aspirasi kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami, sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa.

Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar. Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman SE.

Dengan memiliki persamaan tujuan yaitu untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar.

KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan DEKLARASI BERSAMA untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi DAERAH OTONOM terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat.

Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008.

Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama yaitu Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra, hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17

juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja, Pimpinan Umum).

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Sedangkan ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah, yang terletak di jalur Bandung-Jakarta.

1.1.1 Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

"BANDUNG BARAT CERMAT" Bersama Membangun Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, Dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan.

a. Makna Cerdas Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di kabupaten bandung barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berahlak mulia dan memiliki integritas dan berdaya saing.
b. Rasional Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah disesuaikan dengan realitas yang ada termasuk

http://www.bandungbaratonline.co.cc/

c. didalamnya pemanfaatan potensi lokal dan kemampuan sumber daya serta harus memiliki indikator capaian kinerja yang terukur.
d. Maju Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu kabupaten bandung barat harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.
e. Agamis Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
f. Sehat Mengandung pengertian di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.
g. Agroindustri Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di kabupaten bandung barat melalui diversifikasi hasil-hasil pertanian.
h. Wisata ramah lingkungan Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

1.1.2 Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Misi menggambarkan bagaimana visi yang akan dicapai dan memberikan kerangka bagi penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai, maka untuk mewujudkan visi tersebut diatas, dirumuskan 6 (enam) misi, antara lain :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, sehat dan berdaya saing.
c. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
d. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
e. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
f. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun operasional dari misi tersebut, dijabarkan dalam strategi sebagai berikut :

1) **Misi Pertama** : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggran yang pro publik.

Misi ini dijabarkan dalam 3 (tiga) tujuan :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintahan daerah.
   b. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, dengan sasaran:
   a. Tersedianya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi lokal.
   b. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan.
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya tingkat capaian sasaran pelaksaan program dan kegiatan pemerintahan.
   b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan birokrasi yang berlaku.
   c. Tercapainya minimalisasi biaya sumber daya untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
   d. Meningkatnya ruang dan media partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) **Misi Kedua** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing.

Misi ini dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan :

1. Terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya saran dan prasarana keagamaan.
   b. Meningkatnya penghayatan dan pemahaman ajaran agama.
   c. Meningkatnya kesalehan sosial dan semangat hidup bergotong royong sebagai implementasi dari ajaran agama.
2. Terciptanya sumber daya manusia yang cerdas :
   a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas srana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.
   b. Meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan.
   c. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan.
   d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap dunia pendidikan yang berkeadilan
3. Terciptanya sumber daya manusia yang sehat :
   a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
   c. Meningkatnya capaian indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan.
   d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkeadilan.

4. Terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing :
   a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat di bidang sosial ekonomi.
   b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja.

3) **Misi Ketiga** : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

1. Terciptanya pemberdayaan ekonomi keraktyatan, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok kelompok usaha kesil menengah.
   b. Meningkatnya kesadaran berkoperasi.
2. Terciptanya pengembangan sektor agro bisinis dan agro wisata, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk pengembangan budidaya pertanian.
   b. Meningkatnya pengembangan industri penunjang dan industri pengolahan hasil hasil pertanian.
   c. Meningkatnya pengembangan potensi potensi agro wisata yang berwawasan lingkungan

4) **Misi Keempat** : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

   Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

   1. Terpelihara kelestarian lingkungan, dengan sasaran :
      a. Meningkatnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan lingkungan.
      b. Meningkatnya penegakan hukum pelestarian lingkungan
      c. Meningkatnya upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan.
   2. Terciptanya keseimbangan lingkungan dalam pemanfaatannya, dengan sasaran:
      a. Mewujudkan manajemen penataan ruang yang efektif.
      b. Meningkatnya pendayagunaan fungsi lahan secara efektif dan efisien

5) **Misi Kelima** : Meningkatnya kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

   Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

   1. Terwujudnya peningkatan infrastruktur wilayah, dengan sasaran :
      a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan.
      b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pengairan.
      c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan energi meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pemukiman.

2. Terwujudnya kualitas penanganan mitigasi bencana, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam antisipasi terjadinya bencana.
   b. Meningkatnya kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam penanganan bencana.
   c. Meningkatnya sarana dan prasarana penaganana bencana.

6) **Misi Keenam** : Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

   Misi ini dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan :

1. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
   b. Meningkatnya kualitas kebijakan penganggaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan keuangan desa yang berkeadilan.
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas demokratisasi dan ketahanan masyarakat desa.
   b. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pembangunan desa.
   c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa berbasis partisipatif.
   d. Meningkatnya kualitas masyarakat desa yang memiliki kemampuan lifeskill.

1.1.3 Motto Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Gambar 1.1

Motto "WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA"



WIBAWA MUKTI

Suatu tatanan kehidupan yang mencerminkan tekad keinginan kuat dalam menata kehidupan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan.

KERTARAHARJA

Suatu tatanan kehidupan yang didambakan masyarakat yaitu sejahtera lahir maupun bathin dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa.

1.1.4 Logo dan Arti Lambang

Gambar 1.2

Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat



1. **Bintang Segilima dan Peneropong Bintang Bosscha Berwarna Kuning**



Gambar bintang segilima warna kuning emas dengan latar belakang berwarna biru melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah masyarakat dengan kehidupan yang Agamis (Religius) dan Peneropongan Bintang sebagai simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan merupakan ciri atau identitas yang khas dari Kabupaten Bandung Barat.

2. **Simbol Industri Berwarna Hijau Dengan Latar Belakang Berwarna Merah**



Gambar Simbol Industri Warna Hijau dengan asan industri yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sangat potensial dan strategis untuk mendukung agro industri yang ramah lingkungan.

3. **Pohon Pisang Dengan 2 (Dua) Pelepah Daun Warna Hijau Dan 1 (Satu) Bunga Melati Warna Putih Dengan Latar Belakang Berwarna Merah**



Gambar Pohon Pisang dengan 2 (dua) buah pelepah daun warna hijau dan 1 (satu) Bunga Melati warna putih dengan latar belakang warna merah menggambarkan tanggal 2 Januari sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat dan melambangkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi lahan pertanian, perkebunan, hasil bunga yang sangat potensial untuk pengembangan agro wisata dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. **Bendungan Bergerigi 19 Buah Berwarna Hitam Dan Gelombang Warna Biru Dan Warna Putih Berjumlah 6 Buah Dan Gunung Berwarna Hijau**



Gambar bendungan bergerigi 19 (sembilan belas) buah dan gelombang berjumlah 6 (enam) buah menggambarkan bahwa pada tanggal 19 bulan Juni adalah peresmian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan melambangkan bahwa di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber air, danau dan bendungan yang berfungsi sebagai lahan perikanan serta sumber pembangkit tenaga listrik, adapun pegunungan merupakan kawasan konservasi dan wisata alam.

5. **Mangkuk Berwarna Hitam**



Gambar Mangkuk berwarna hitam melambangkan bahwa daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber daya alam dan lahan pertambangan yang besar, seperti Batu Gamping, Andesit, Marmer dan Pasir.

6. **Perisai atau disebut juga Garda**



Artinya alat pelindung yang memberikan rasa aman dari ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar sehingga tercipta suasana tenang, damai dan kondusif.

7. **Jantung**



Merupakan alat pemompa, pengatur dalam menjalankan aktifitas sehingga dapat mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

8. **Pita Label**



Label yang berbentuk pita yang merupakan nilai yang dimiliki sebagai perwujudan identitas diri sehingga dapat memberikan satu gambaran yang jelas terhadap kondisi objektif.

1.2 Sejarah Divisi / Humas

Terbentuknya Humas di Pemerintah Daerah Bandung Barat ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, mengenai Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota.

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan atau perumusan bahan kebijakan,melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang Dokumentasi dan Pengolaham Data ,Pemberitaan dan Protokol.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai fungsi :

a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi, Pemberitaan dan Protokol.
b. Pengkajian bahan rencana dan program kerja di bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi, Pemberitaan dan Protokol.
c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi, Pemberitaan dan Protokol.
d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi, Pemberitaan dan Protokol.

Rincian tugas bagian Hubungan Masyarakat (Humas) :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja bagian Hubungan Masyarakat.
b. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan umum kehumasan.
c. Melaksanakan pengkajian bahan pelayanan media cetak dan sambutan Bupati.
d. Melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis.

e. Melaksanakan pengkajian bahan penyusunan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat.
f. Melaksanakan koordinasi antar pemerintah Kabupaten dengan lembaga pemerintah daerah.
g. Melaksanakan pengkajian bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintah,pembangunan kemasyarakatan serta LSM.
h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka hubungan masyarakat.
i. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian dalam rangka kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan.
j. Melaksanakan penyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
l. Melaksanakan ketatausahaan bagian.
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan Peraturan pemerintah No. 41, maka Pemerintah Daerah membentuk bagian Humas dibawah lingkup Sekretariat Daerah. Bagian Humas ini terdiri dari tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data, dan Sub Bagian Pemberitaan, yang masing-masing memiliki tugas pokok berbeda.

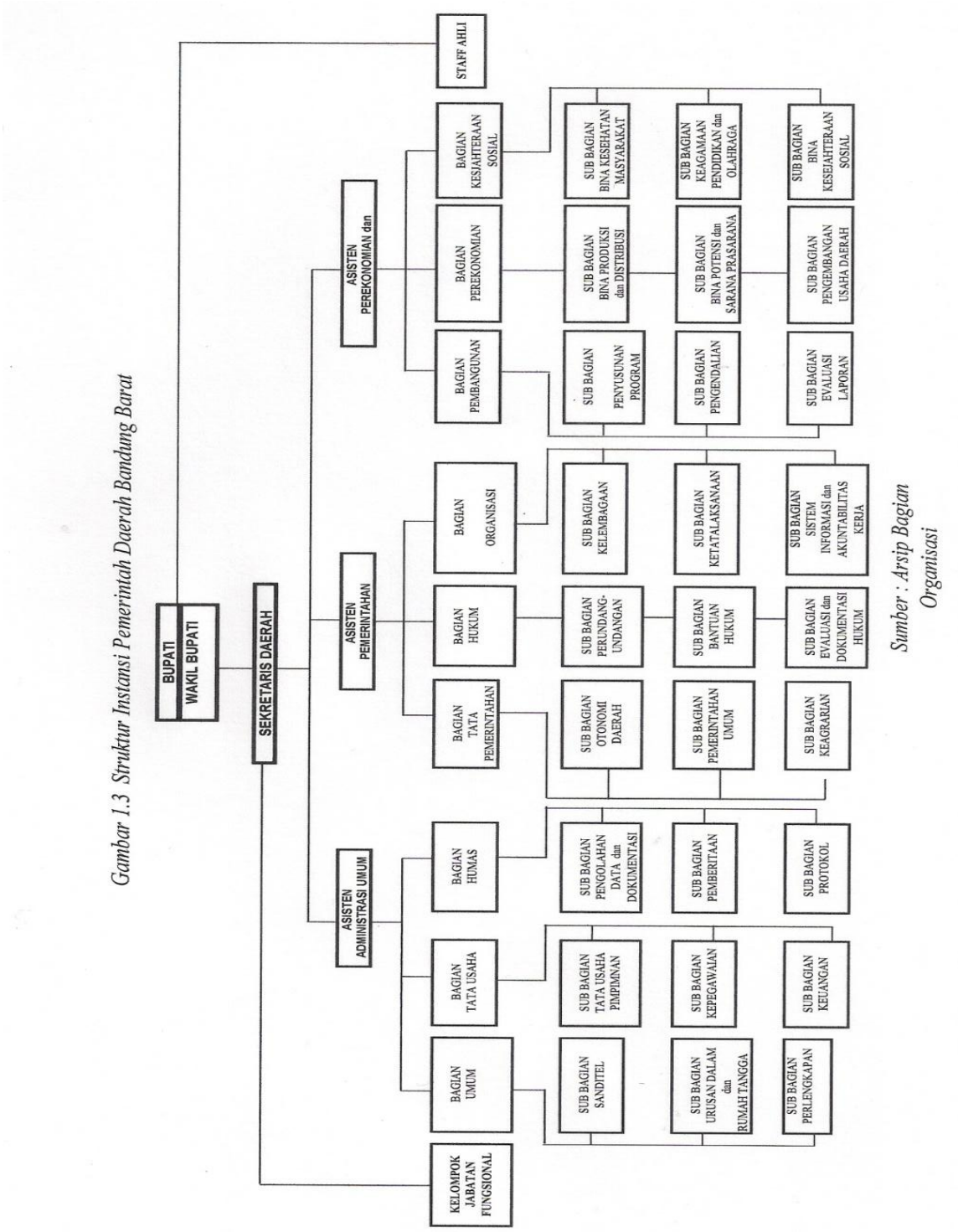
a. Sub bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis administratif di bidang keprotokolan..
b. Sub bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan dan analisis data, penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis administratif di bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data.
c. Sub bagian Pemberitaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis administratif di bidang Pemberitaan.

Berdasarkan pembagian tugas dan fungsi di atas, Humas di Pemerintah Daerah Bandung Barat selalu mengalami perkembangan disetiap tahunnya. Hingga saat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Divisi tesebut, semua tugas Divisi Humas berjalan sesuai dengan ketentuannya.

1.3 Struktur Pemerintah Daerah Bandung Barat

Struktur Organisasi merupakan tata cara mengatur hubungan kerja setiap anggota, yaitu menentukan batas wewenang tugas beserta tanggung jawab masing-masing pegawai. Berdasarkan jabatan yang dipegang masing-masing dengan susunan organisasi akan terlibat dimana kedudukan batas wewenang dan tanggung jawab seseorang dengan kegiatan dan fungsi yang telah ditentukan.

Berikut struktur organisasi pada Pemerintah Daerah Bandung Barat :



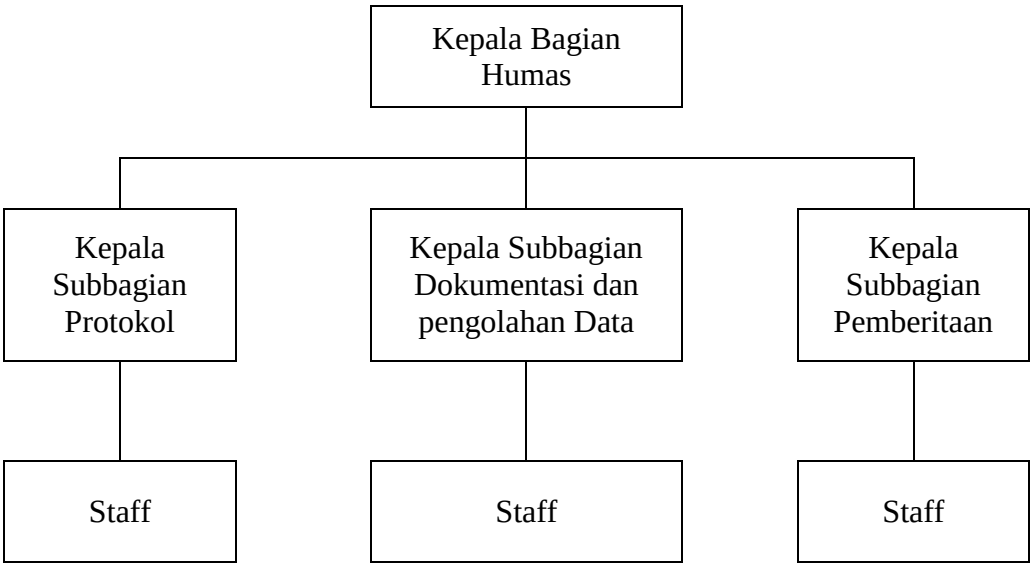
Gambar 1.3 Struktur Instansi Pemerintah Daerah Bandung Barat

Sumber : Arsip Bagian Organisasi

1.4 Struktur Divisi / Humas

Gambar 1.4

Struktur Organisasi Humas Pemerintah Daerah Bandung Barat



Sumber : Arsip Internal Pemerintah Daerah Bandung Barat, 2010

1.5 Job Deskription

1. Sub Bagian Protokol

Sub bagian Protokol mempunyai fungsi:

a. Penelaahan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja subbagian protokol.

b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif sub bagian protokol.

Rincian tugas sub bagian Protokol :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian Protokol .
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum keprotokolan.
c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan keprotokolan.
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan lingkup keprotokolan.
e. Melaksanakan kegiatan lingkup keprotokolan yang meliputi pelaksanaan dan fasilitasi jadwal kegiatan pimpinan, pengkoordinasian keprotokolan, pembinaan dan fasilitasi bantuan keprotokolan serta pelayanan keprotokolan.
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup keprotokolan.
g. Melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan program lingkup bagian keprotokolan .
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
i. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data

Sub bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

a. Penelaahan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja sub bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data.

b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif sub bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data**.**

Rincian tugas sub bagian Pengolahan data dan Dokumentasi:

a. Menyusun rencana program kerja Sub bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data.

b. Melaksanakan penyusunan bahan Pengolahan Data, Dokumentasi foto display dan menyiapkan bahan-bahan rekaman.

c. Menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan dokumentasi dan pengolahan data.

d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup dokumentasi dan pengolahan data.

e. Melaksanakan kegiatan lingkup dokumentasi dan pengolahan data yang meliputi inventarisasi dan analisasi data dan keperluan kehumasan, penyusunan profil kabupaten, pengkoordinasian pengolahan data, dan pendokumentasian kegiatan-kegitanan pemerintahan.

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup dokumentasi dan pengelolaan data.

g. Melaksanakan pengumpulan data lingkup sub bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data.

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
i. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Sub bagian Pemberitaan

Sub bagian Pemberitaan mempunyai fungsi:

a. Penelaahan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja sub bagian Pemberitaan;
b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif sub bagian Pemberitaan;

Rincian tugas sub bagian Pemberitaan :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Pemberitaan.
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan Sub bagian Pemberitaan.
c. Melaksanakan kegiatan lingkup pemberitaan meliputi pemantauan kegiatan-kegiatan pemerintahan, analisa dan penyusunan bahan pemberitaan, penyebarluasan informasi dan profil pemerintah Kabupaten, serta penyelenggaraan dan penyusunan bahan konfrensi pers.
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberitaan.
e. Melaksanakan pengumpulan bahan program lingkup bagian Pemberitaan.

f. Melaksanakan pengurusan pemanfaatan sarana dan prasarana lingkup Pemberitaan.
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
h. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.6 Sarana dan Prasarana

Setiap perusahaan yang memiliki standar mutu yang baik, sudah pasti harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi karyawannya agar dapat mengerjakan tugasnya secara maksimal.

1.6.1 Sarana

Sarana yang dimiliki oleh Divisi/Humas Pemerintah Daerah Bandung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sarana Humas Pemerintah Daerah Bandung Barat

Nama	**Banyak**
Ruang Kepala Bagian	1
Ruang Kepala Sub bagian	3
Ruang Staff	1
Mushola	1
Gudang	1

1.6.2 Prasarana

Adapun Prasarana yang dimiliki Divisi/Humas Pemerintah Daerah Bandung Barat dalam mendukung pekerjaan karyawannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Prasarana Humas Pemerintah Daerah Bandung Barat

Nama	**Banyak**
Meja	8
Kursi	12
Komputer	2
Laptop	3
Loker	2
Lemari	2
Papan Jadwal Kegiatan	1
Papan Pengumuman	1
Printer	2
Sofa	1
Tempat Koran	1
Kipas Angin	3
Televisi	1

Sumber : Arsip Internal pemerintah Daerah Bandung Barat, 2010

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pemerintah Daerah Bandung Barat yang berlokasi di Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 No. 46 Kabupaten Bandung Barat 40561. Telp/Fax. (022) 6866258, (022) 6866259.

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung selama 1 bulan yakni terhitung dari tanggal 05 Juli s/d 05 Agustus 2010.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada unit Humas dengan jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. Setiap hari kerja yaitu hari Senin s/d Jum’at dan libur pada hari Sabtu dan Minggu.